

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bagir Manan & Kuntana Magnar, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia (Bandung: PT. ALUMNI, 2017)
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Budi Rizki Husin, S.H., M.H., Stud Lembaga Penegak Hukum, ed. by Dr. Ema Dewi, S.H., M.H. (Bandar Lampung: Heros Fc, 2020)
- HR., Ridwan, Hukum Administrasi Negara, 1st edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993)
- Kelana, Momo, Hukum Kepolisian (Perkembangan Hukum Kepolisian Di Indonesia) : Suatu Studi Historis Komparatif (Djakarta, 1972)
- Komisi Pemberantasan Korupsi, Konflik Kepentingan : Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggaraan Negara (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009)
- Konstitusi, Mahkamah, Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi, 2016, (Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi).
- Marlina, G E, Dwi Ekasari Harmadji, Okki Trinanda, Osrita Hapsara, Anggraini Syahputri, Mohammad Habibi, and others, Manajemen Sumber Daya Manusia, ed. by M.M Muhammad Taher Rambe, S.E., 1st edn (PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022)
- Marsono, Sastra Djatmika, Hukum Kepegawaian Di Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1995)
- Muchsan, Roeloeff Kranenburg - Vegting, Nleiding n Het Nederlands Administratief-Frecht Dalam Hukum Kepegawaian: Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Suatu Tinjauan Dari Segi Yuridis) (Jakarta: Bina Aksaran, 1982)
- Purwadarminta, W.J.S., KAMUS UMUM BAHASA INDONESIA / Susunan W.J.S. Poerwadarminta ; Diolah Kembali Oleh Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1999)
- Saputra, M. Nata, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali, 1988)
- Sidharta, B. Arief, Pengantar Hukum Indonesia (Jakarta, 2006)

Soerjono, Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 14th edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji., Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, 17th edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)

B. JURNAL

Amut, Gamaliel Susabun, Nicholas Krishnamurti Wibowo, and Rainja Lois, "*Kacamata Driyarkara : Kemunduran Reformasi: Dwifungsi TNI-Polri*", 2021, 1–12

Arif, Muhammad, "*Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menirir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*", Al'Adil : Jurnal Hukum, 13.1 (2021), 91–101

Bagus, Moh Afif Hidayatul Mahmudah, Amim Thobary, Faizah Maulidah., "*Fenomena Pengisian Jabatan Pegawai Negeri Sipil Oleh TNI/Polri*", Vol. 1 (2017), 18

Darry, Mohammad, Diah Asri, "*Analisis Yuridis Kedudukan Jabatan Anggota Polri Aktif Di Luar Institusi Polri Di Tengah Isu Dwi-Fungsi Polri*", Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics), 8.1 (2021), 30–48

Denandra, Ida Bagus Kade, "*Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*", Lex Crimen, 1.4 (2012), 41–59

Fahrani, Novi Savarianti, "*Analisis Kriteria Dan Syarat Jabatan ASN Tertentu Yang Dapat Diisi Dari Anggota Polri Dan Prajurit TNI*", Civil Service, Vol. 12. No. 2 (2018), 139–54

Hadi, Syofyan, "*Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration*", Jurnal Cita Hukum, 5.2 (2018), 383–400

Halilah, Siti, and Fakhrurrahman Arif, "*Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*", Jurnal Hukum Tata Negara, 4.Desember (2021), 56–65

Hamzani, Achmad Irwan, "*Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*", 90, 1–9

Herman, Herman, and Hendry Julian Noor, "*Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (Beschikking)*", Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 3.1 (2017), 82

Jumadi, "*Negara Hukum Dan Pembangunan Nasional Berwawasan Hukum*", Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 2017

- May Lim Charity, “Ironi Praktik Rangkap Jabatan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (*Irony Practices Of The Double Duty In Indonesia State System*)”, *Jurnal Legislasi Indonesia : Indonesian Journal of Legislation*, Vol 13. No. 1 (2016)
- Muhammad rizky pranata, Panhar Makawi, “*Tinjauan Umum Terhadap Pengangkatan Anggota Polri Aktif Untuk Menjabat Sebagai Kepala Daerah (Studi Kasus : Pengangkatan Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Mochamad Iriawan Sebagai Pj. Gubernur Jawa Barat)*”, *JCA of Law Esa UnggulUniversity*, 1 (2020), 264–75
- Prayogo, R. Tony, “*Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang*”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13.2 (2016), 191–202
- Ruchimat, Tatang, “*Penunjukan Anggota Polri Aktif Untuk Menduduki Jabatan Di Luar Kepolisian Ditinjau Dari Asas Kepastian Hukum*”, *Jurnal Hukum Adigama*, 3.3 (2020), 826–45
- Wicaksono, Dian Agung, and Faiz Rahman, “*Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah*”, *Jurnal Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, Vol 11. No. 2 (2020), 231–48

C. PERUNDANG-UNDANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran RI Nomor 4168. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang *Aparatur Sipil Negara*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran RI Nomor 5494. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang *Aparatur Sipil Negara*. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran RI Nomor 6897. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang *Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 2, Tambahan Lembaran RI Nomor 4256. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang *Manajemen Pegawai*

Negeri Sipil. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran RI Nomor 6037. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran RI Nomor 6477. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 4 Tahun 2017 Tentang *Pemugasan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 283. Sekretariat Negara. Jakarta.

D. SITUS INTERNET

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia., "*KBBI Daring*" (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/polisi>)
Diakses Pada 20 November 2023

Purnomo Sucipto, "*Pengisian Jabatan Struktural Instansi Sipil Oleh TNI/POLRI*", 2017 (<https://sijoritoday.com/2017/01/16/pengisian-jabatan-struktural-instansi-sipil-tnipolri/>)
Diakses Pada 25 Maret 2024

"*TNI-Polri Bisa Isi Jabatan ASN Hanya Di Posisi Eselon I Dan Pemerintah Pusat*", *Parlementaria DPR RI*, 2024 ([https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48808/t/TNI-Polri Bisa Isi Jabatan ASN Hanya di Posisi Eselon I dan Pemerintah Pusat](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/48808/t/TNI-Polri%20Bisa%20Isi%20Jabatan%20ASN%20Hanya%20di%20Posisi%20Eselon%20I%20dan%20Pemerintah%20Pusat))
Diakses Pada 24 Maret 2024